



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp/Fax (0511) 4770061 / 4770062
Website : <http://www.kalsel.go.id> E-mail pemprov@kalsel.go.id

BANJARBARU

Banjarbaru, 21 Agustus 2025

Nomor : 900.1.1/1878/BPKAD/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Penilaian Kesesuaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2026 dengan KEM PPKF

Yth. Bupati Barito Kuala
Di –
T E M P A T

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan penilaian atas kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Barito Kuala dengan KEM PPKF.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Barito Kuala dengan KEM PPKF. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyelarasan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan penyempurnaan atas rancangan KUA dan PPAS yang sedang dilakukan pembahasan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Namun dalam hal rancangan KUA dan Rancangan PPAS telah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Selatan
Sekretaris Daerah,

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker : 992228

Nama Pemda : Kab. Barito Kuala

Verifikator : Provinsi Kalimantan Selatan

A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	4,5 - 5,2	4,7	Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan target maksimal angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7% yang sesuai dengan interval yang ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rakortekbang Desk Indikator Makro Pembangunan Daerah untuk penyusunan RKPd 2026 antara Bappeda Provinsi Kalsel dan Bapperida Kabupaten Barito Kuala sebesar 4,5 - 5,2%. Meskipun penetapan target sebesar 4,7% masih dalam rentang angka yang ditetapkan dalam dokumen Berita Acara, harapannya target angka pertumbuhan tersebut dapat disesuaikan dengan target pada dokumen Berita Acara Kesepakatan Rakortekbang. Angka target dimaksud dapat diperbaiki dalam Rancangan Akhir KUA PPAS. Diharapkan pula, angka target pertumbuhan ekonomi dimaksud dapat didukung dengan penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, sub-kegiatan yang relevan, serta didukung pula dengan kebijakan yang menunjang iklim usaha dan investasi di Kabupaten Barito Kuala.
Tingkat Kemiskinan	3,96 - 3,46	4,21	Penetapan angka target kemiskinan Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan sebesar 4,21% tidak sesuai dengan angka dalam interval yang ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rakortekbang Desk Indikator Makro Pembangunan Daerah untuk penyusunan RKPd 2026 antara Bappeda Provinsi Kalsel dan Bapperida Kabupaten Barito Kuala sebesar 3,96% - 3,46%. Angka target dimaksud diharapkan dapat diperbaiki dalam Rancangan Akhir KUA PPAS.

B. Penyelarasan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	SELARAS	Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menarasikan dengan baik kebijakan mengenai diversifikasi ekonomi dalam mendukung hilirisasi komoditas, hilirisasi produksi industri dan strategi penguatan Kawasan sentra produksi serta peningkatan daya saing daerah dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia dan tenaga kerja. Hal tersebut menggambarkan komitmen pemda terhadap pemenuhan indikator akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi). Selanjutnya komitmen tersebut agar direalisasikan melalui penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, sub-kegiatan yang relevan. Selain itu, untuk lebih menunjukkan komitmen pemda terhadap pemenuhan indikator akselerasi investasi perlu diperhatikan mengenai kepatuhan terhadap pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indicator pertumbuhan ekonomi tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD mendukung pertumbuhan ekonomi (pengembangan SDM, penguatan modal, dan administrasi pemerintah daerah yang pro investasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	SELARAS	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, pemda telah menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan indikator kesehatan. Selanjutnya komitmen tersebut agar direalisasikan melalui penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, sub-kegiatan yang relevan. Untuk selanjutnya lebih diperkuat dalam aspek pengelolaan belanja kesehatan yang berkualitas dengan memperhatikan pemenuhan SPM Kesehatan. Selain itu, dalam rangka pemenuhan indikator kesehatan perlu diperhatikan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pemda dapat juga melakukan implementasi kebijakan sinergi pendanaan untuk peningkatan infrastruktur kesehatan sebagai salah satu opsi skema pembiayaan.
Ketahanan Pangan (Perikanan)	SELARAS	Narasi dalam KUA yang dicantumkan dalam SIKD belum menjelaskan/menjawab/menunjukkan terkait dengan masing-masing detail indikator strategi kewilayahan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala disarankan memfokuskan anggaran pada penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung ketahanan pangan di sector perikanan dan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam pengelolaan pembudidayaan ikan untuk meningkatkan produksi dan keberlanjutan sektor perikanan. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indicator Ketahanan Pangan (Perikanan) tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD yang mendukung penguatan belanja untuk kerja sama antar daerah, perluasan akses pasar dan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

Uraian	Status	Keterangan
Ketahanan Pangan (Pertanian)	SELARAS	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu mendorong program dan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, dan stabilitas harga pangan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan teknologi tepat guna untuk mencapai target ketahanan pangan yang lebih tinggi. Program-program dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian agar produktivitas pertanian dapat meningkat. Selain hal tersebut di atas, pemda perlu memperhatikan belanja dalam rangka penurunan stunting. Terkait dengan PKB dan opsen PKB perlu pemda perlu memperhatikan sisi compliance terhadap belanja wajib tersebut khususnya yang penggunaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas antar daerah Pengelolaan belanja ketahanan pangan/pertanian dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota baik dalam pendanaan yang bersumber dari TKD/APBD maupun dari skema pendanaan dari creative financing sesuai dengan kewenangan. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indicator Ketahanan Pangan (Pertanian) tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD yang mendukung ketahanan pangan (perbaikan struktur upah, penurunan angka pengangguran, peningkatan Nilai Tukar Petani, pengendalian inflasi, pelaksanaan program sosial yang tepat sasaran)
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	SELARAS	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala agar fokus pada pembangunan desa pada pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal, yang secara langsung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat dan meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dengan target peningkatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif. Agar menjadi perhatian belanja fungsi perlindungan social terutama fokus pada pengentasan kemiskinan serta penguatan mandatory spending yang mendukung Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM serta penurunan kemiskinan. Mohon dipastikan pengawal kebijakan pada indicator Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM serta penurunan kemiskinan dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.

Uraian	Status	Keterangan
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	SELARAS	Narasi dalam KUA secara umum telah selaras dengan indikator strategi kewilayahan, namun demikian perlu diuraikan lebih spesifik kebijakan yang akan dilaksanakan terkait fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI dan penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sector Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala agar memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk lembaga pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat, yang dapat berkorelasi dengan kualitas pendidikan secara umum dan mengidentifikasi program atau kegiatan spesifik yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di Kabupaten Barito Kuala. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indicator pendidikan tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	Status	Keterangan
Mandatory Spending		
PDRD		

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasaan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; • Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa sawit, karet, kopi, ikan haruan, kepiting mangrove, dll); • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	none	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan kebijakan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kebijakan ini dijabarkan melalui pilar-pilar berikut: 1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan; 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah; 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, dan Melayani. Dengan mempertimbangkan arah kebijakan tersebut, serta evaluasi terhadap realisasi indikator makro tahun-tahun sebelumnya, maka target indikator ekonomi makro Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut: a. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 4,7%	SELARAS	Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menarasikan dengan baik kebijakan mengenai diversifikasi ekonomi dalam mendukung hilirisasi komoditas, hilirisasi produksi industri dan strategi penguatan Kawasan sentra produksi serta peningkatan daya saing daerah dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia dan tenaga kerja. Hal tersebut menggambarkan komitmen pemda terhadap pemenuhan indikator akselerasi investasi (pertumbuhan ekonomi). Selanjutnya komitmen tersebut agar direalisasikan melalui penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, sub-kegiatan yang relevan. Selain itu, untuk lebih menunjukan komitmen pemda terhadap pemenuhan indikator akselerasi investasi perlu diperhatikan mengenai kepatuhan terhadap

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
					pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indicator pertumbuhan ekonomi tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD mendukung pertumbuhan ekonomi (pengembangan SDM, penguatan modal, dan administrasi pemerintah daerah yang pro investasi

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan; • Mematuhi pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.	none	Dalam Dokumen Rancangan KUA BAB III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD di luar belanja pegawai/gaji, sesuai amanat konstitusional dan untuk mendukung penguatan layanan kesehatan dasar di masyarakat. Selain itu, pada BAB IV poin 4.2.1 telah dinarasikan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan di kecamatan-kecamatan yang belum optimal, serta melanjutkan penyempurnaan layanan Klinik Utama Setara sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah Tahun 2026. Serta pada poin 4.2.3 telah dinarasikan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing – dengan penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penurunan angka stunting dan kemiskinan.	SELARAS	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, pemda telah menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan indikator kesehatan. Selanjutnya komitmen tersebut agar direalisasikan melalui penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, sub-kegiatan yang relevan. Untuk selanjutnya lebih diperkuat dalam aspek pengelolaan belanja kesehatan yang berkualitas dengan memperhatikan pemenuhan SPM Kesehatan. Selain itu, dalam rangka pemenuhan indikator kesehatan perlu diperhatikan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pemda dapat juga melakukan implementasi kebijakan sinergi pendanaan untuk peningkatan infrastruktur kesehatan sebagai salah satu opsi skema pembiayaan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Perikanan)	• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan; • Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan.	none	Pada Dokumen KUA Bab IV poin 4.2.3. telah menarasikan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah – melaluienguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata daerah sebagai salah satu fokus prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026	SELARAS	Narasi dalam KUA yang dicantumkan dalam SIKD belum menjelaskan/menjawab/menunjukkan terkait dengan masing-masing detail indikator strategi kewilayahan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala disarankan memfokuskan anggaran pada penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung ketahanan pangan di sector perikanan dan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam pengelolaan pembudidayaan ikan untuk meningkatkan produksi dan keberlanjutan sektor perikanan. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indicator Ketahanan Pangan (Perikanan) tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD yang mendukung penguatan belanja untuk kerja sama antar daerah, perluasan akses pasar dan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya.	none	Pada Dokumen KUA Bab IV poin 4.2.3. telah menarasikan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah – melalui enguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata daerah sebagai salah satu fokus prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026	SELARAS	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu mendorong program dan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, dan stabilitas harga pangan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan teknologi tepat guna untuk mencapai target ketahanan pangan yang lebih tinggi. Program-program dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian agar produktivitas pertanian dapat meningkat. Selain hal tersebut di atas, pemda perlu memperhatikan belanja dalam rangka penurunan stunting. Terkait dengan PKB dan opsen PKB perlu pemda perlu memperhatikan sisi complaince terhadap belanja wajib tersebut khususnya yang penggunaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas antar daerah Pengelolaan belanja ketahanan

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
					pangan/pertanian dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota baik dalam pendanaan yang bersumber dari TKD/APBD maupun dari skema pendanaan dari creative financing sesuai dengan kewenangan. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indicator Ketahanan Pangan (Pertanian) tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD yang mendukung ketahanan pangan (perbaikan struktur upah, penurunan angka pengangguran, peningkatan Nilai Tukar Petani, pengendalian inflasi, pelaksanaan program sosial yang tepat sasaran)

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Mematuhi pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menargetkan pertumbuhan ekonomi melalui peran UMKM berbasis desa, dengan tetap mengedepankan keberlanjutan dan pemerataan wilayah. Selain itu, Pada Dokumen KUA Bab IV poin 4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menarasikan Penguatan kapasitas desa, khususnya melalui peningkatan jumlah desa mandiri yang difasilitasi dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama (Bumdesma) yang aktif dan produktif, serta pada poin 4.2.3. telah menarasikan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah – melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata daerah	SELARAS	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala agar fokus pada pembangunan desa pada pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal, yang secara langsung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat dan meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dengan target peningkatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif. Agar menjadi perhatian belanja fungsi perlindungan social terutama fokus pada pengentasan kemiskinan serta penguatan mandatory spending yang mendukung Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM serta penurunan kemiskinan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
					Mohon dipastikan pengawal kebijakan pada indicator Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM serta penurunan kemiskinan dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	Pada Dokumen KUA Bab IV poin 4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menjadikan Pemenuhan kewajiban alokasi belanja sesuai dengan mandatory spending, yakni Pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah sebagai prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang bertema ■Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan SDM	SELARAS	Narasi dalam KUA secara umum telah selaras dengan indikator strategi kewilayahan, namun demikian perlu diuraikan lebih spesifik kebijakan yang akan dilaksanakan terkait fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI dan penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sector Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala agar memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk lembaga pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat, yang dapat berkorelasi dengan kualitas pendidikan secara umum dan mengidentifikasi program atau

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
					kegiatan spesifik yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di Kabupaten Barito Kuala. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indicator pendidikan tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Klasifikasi	Nilai	Total Belanja	Persentase	Target Budget Optimizer	Skor
Belum ada data.					

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Belanja	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.						

PDRD

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Pendapatan	Nilai Minimal	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.							